

BEKERJANYA DEMOKRASI MELALUI MODAL SOSIAL

Itok Dwi Kurniawan¹

itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Abstrak: Modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma yang diwujudkan dalam perilaku yang mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerja sama dan berkoordinasi untuk kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Ada tiga unsur parameter modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), norma (*norms*) dan jaringan (*networks*). Demokrasi sendiri memiliki modal sosial berupa kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu bekerjanya demokrasi melalui modal sosial perlu berjalan seiringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bekerjanya demokrasi melalui modal sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial demokrasi dalam memberikan dukungan terhadap tumbuhnya modal sosial masih terhalang akan kebudayaan, hukum dan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: modal sosial, modal sosial demokrasi, masyarakat

PENDAHULUAN

Sebuah berita sedih terpasang di surat kabar. Dikabarkan hilangnya sebuah pesawat Boeing 737 beserta seratus penumpangnya. Setelah dua minggu pencarian tidak berhasil, keluarga korban mulai belajar merelakan. Mereka hanya bisa berdoa agar paling tidak mereka masih bisa melihat jenazah sanak mereka, terutama setelah seorang nelayan menemukan potongan pesawat di Selat Makassar. Diberitakan, angin topan telah menyebabkan pesawat lepas kendali. Namun banyak juga yang menyalahkan persaingan sebagai biang keladi kecelakaan tersebut. Bagaimana bisa?

Berita di atas memperlihatkan kejadian menarik. Pertama, hilangnya pesawat Boeing 737 beserta seratus penumpangnya. Kedua, keluarga yang mencoba merelakan hilangnya sanak

saudara mereka dan berdoa paling tidak masih bisa melihat jenazah sanak saudara mereka. Kejadian pertama dan kedua ini dilandasi sebuah faktor: kepercayaan. Kejadian pertama dilandasi rasa percaya akan hilangnya pesawat Boeing 737 beserta seratus penumpangnya yang diumumkan di surat kabar. Adapun kejadian kedua dilandasi rasa percaya bahwa masih bisa melihat jenazah sanak saudara mereka. Hal yang luput dari kejadian tersebut adalah rasa percaya para penumpang kepada pilot pesawat tersebut. Rasa percaya itu membuat penumpang yakin bahwa mereka akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Rasa percaya itu merupakan salah satu bentuk modal sosial.

Modal sosial memberikan manfaat yang sangat besar. Modal sosial dapat membantu masyarakat mewujudkan apa

¹ Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret

yang disebut sebagai masyarakat sipil. Sebuah masyarakat sipil yang ditopang oleh modal sosial terdapat keunggulan, yaitu memiliki daya tahan yang lebih baik karena terbentuknya kepercayaan atas dasar kejujuran dan asas timbal balik.

Daya tahan yang baik tersebut memungkinkan masyarakat sipil, yang didalamnya terdiri atas individu dan organisasi, untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing yang mungkin diabaikan oleh negara otoriter. Masyarakat sipil ini juga mendorong terwujudnya demokrasi liberal. Alexis de Tocqueville pastilah akan setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa tanpa modal sosial, tidak akan ada masyarakat sipil, dan tanpa masyarakat sipil tidak akan ada demokrasi yang berhasil. Demokrasi liberal bisa tercapai dengan baik di Amerika karena modal sosial berupa damai. Berbeda dengan negara Eropa yang sejarahnya berputar-putar dalam perang dan damai di antara negara-negara kuat.

Pemerintah terbatas ala Amerika berfondasikan situasi damai yang mengandaikan perang merupakan sebab utama sentralisasi politik dan ekspansi birokrasi. Oleh karena perang, negara merupakan andalan utama masyarakat bagi terciptanya ketertiban dan keamanan. Untuk menciptakan ketertundukan, negara menyebarkan birokrasinya untuk menarik pajak. Di Amerika, situasi ini tidaklah terjadi. Kelembagaan politik tumbuh dalam suasana federalisme atau desentralisasi yang tumbuh dengan mengadaptasi nilai-nilai lokal.

Oleh karena terbatas, akhirnya pemerintah lokal melibatkan masyarakat

untuk memutuskan hal-hal penting. Sistem inilah yang mendorong tingginya partisipasi masyarakat Amerika. Partisipasi yang tinggi ini mendorong semacam adanya kepercayaan dari warga kepada warga lain untuk memperjuangkan kepentingan dan keinginan mereka.

Untuk dapat menjelaskan bekerjanya modal sosial bagi demokrasi, Robert Putnam berpendapat bahwa adanya mutu pemerintahan yang berkaitan dengan modal sosial terus menurun. Hal ini dikaitkan dengan penelitian dia tentang kedekatan seorang dengan organisasi yang diikutinya dan indeks partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Salah satu hasil pentingnya adalah semakin menurunnya partisipasi politik masyarakat Amerika untuk mengikuti pemilu.

Salah satu penyebab menurunnya adalah rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah itu sendiri. Rasa *distrust* banyak muncul karena tidak adanya program pemerintah yang menguntungkan masyarakat banyak, terutama masyarakat bukan pemilih dia. Jika situasi *distrust* terus dipertahankan, tahap selanjutnya adalah situasi anarki. Perlu diketahui, demokrasi yang kebablasan juga mengakibatkan anarki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2011: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data

yang digunakan observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miller dan Huberman (2007: 36) yang terdiri dari empat langkah yaitu: 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; dan 4) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

1. Pengertian Modal Sosial

Secara sederhana, modal sosial dapat diartikan sebagai perangkat nilai atau norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota suatu kelompok yang memungkinkan kerja sama di antara mereka. Jika anggota kelompok itu yakin bahwa anggota yang lain dapat dipercaya dan jujur, mereka akan saling percaya. Kepercayaan itu seperti pelumas yang membuat kelompok atau organisasi sosial dapat berjalan secara efisien.

Modal sosial digunakan pertama oleh L.J. Hanifan untuk menggambarkan pusat masyarakat sekolah di pedesaan. Jane Jacobs menggunakan istilah modal sosial dalam karya klasik yang berjudul *The Death and Life of Great American Cities* untuk menjelaskan bahwa jaringan sosial yang sangat padat di permukaan urban yang penggunaan lahannya beragam merupakan sebetulnya modal sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum.

Selain tokoh di atas, ahli penting dalam perkembangan teori tentang modal sosial adalah Alexis de Tocqueville. Kehebatan de Tocqueville jika dibandingkan ahli lainnya adalah dia tidak pernah sama sekali menggunakan istilah modal sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya, *Democracy in America*, de Tocqueville menyatakan Amerika memiliki seni berserikat yang tinggi, dalam arti, rakyatnya biasa berserikat dalam suatu himpunan sukarela untuk tujuan tertentu, baik yang sepele maupun yang serius.

Bagi Tocqueville, demokrasi Amerika dan sistem pemerintahan terbatasnya berjalan semata-mata karena orang Amerika sangat cekatan membentuk himpunan untuk tujuan sosial dan politik. Pelajaran dari demokrasi Amerika adalah kemampuan mengatur diri sendiri tidak saja berhubungan dengan upaya pemerintah untuk memaksakan ketertiban umum secara hierarki, tetapi himpunan warga juga merupakan tempat belajar memerintah diri sendiri. Modal sosial memudahkan kita membentuk kelompok sosial, meskipun kita juga dapat membentuk kelompok sosial tanpa adanya modal sosial, yaitu menggunakan kontrak, hierarki, anggaran dasar, dan sistem hukum.

Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerja sama di antara mereka. Adapun Cox (1995)

mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.

Sejalan dengan Fukuyama dan Cox, Partha dan Ismail S. (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat dalam spektrum yang luas, yaitu sebagai perekat sosial (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Bagnasco (2001) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerja sama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas.

2. Unsur – unsur modal sosial

Ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan-jaringan (*networks*).

a. Kepercayaan (*trust*)

Sebagaimana dijelaskan Fukuyama (1995), kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial

merupakan penerapan terhadap pemahaman ini. Cox (1995) kemudian mencatat bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif; hubungan-hubungan juga bersifat kerja sama. Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Adanya modal sosial yang baik ditandai oleh adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh; modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis (Putnam, 1995). Kerusakan modal sosial akan menimbulkan *anomie* dan perilaku anti sosial (Cox, 1995).

b. Norma (*Norms*)

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerja sama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerja sama (Putnam, 1993; Fukuyama, 1995). Norma-norma dapat merupakan pra-kondisi dan produk dari kepercayaan sosial.

c. Jaringan (*Networks*)

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antarmanusia (Putnam, 1993). Jaringan tersebut

memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerja sama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain. Mereka kemudian membangun inter-relasi yang kental, baik bersifat formal maupun informal Putnam (1995) berargumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerja sama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu.

Bersandar pada parameter di atas, beberapa indikator kunci yang dapat dijadikan ukuran modal sosial antara lain (Suharto, 2005):

- 1) perasaan identitas;
- 2) perasaan memiliki atau sebaliknya, perasaan alienasi;
- 3) sistem kepercayaan dan ideologi;
- 4) nilai-nilai dan tujuan-tujuan;
- 5) ketakutan-ketakutan;
- 6) sikap-sikap terhadap anggota lain dalam masyarakat;
- 7) persepsi mengenai akses terhadap pelayanan, sumber dan fasilitas (misalnya pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan, transportasi, jaminan sosial);
- 8) opini mengenai kinerja pemerintah yang telah dilakukan terdahulu;
- 9) keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat dan orang-orang pada umumnya;
- 10) tingkat kepercayaan;

11) kepuasan dalam hidup dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya; dan

12) harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan.

Dapat dikatakan bahwa modal sosial dilahirkan dari bawah (*bottom-up*), tidak hierarkis dan berdasar pada interaksi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, modal sosial bukan merupakan produk dari inisiatif dan kebijakan pemerintah. Namun, modal sosial dapat ditingkatkan atau dihancurkan oleh negara melalui kebijakan publik.

3. Bekerjanya Demokrasi melalui Modal Sosial

Bekerjanya prinsip-prinsip demokrasi tidak terlepas dari sebuah pertanyaan singkat: aturan siapa yang sebaiknya dipatuhi? Aturan yang dibuat oleh komunitas, aturan yang dibuat oleh masyarakat, atau aturan yang dipaksakan berlakunya oleh negara.

Setiap masyarakat memiliki derajat kepercayaan yang berbeda-beda, yang tercermin dalam norma-norma kerja sama, misalnya, kejujuran, asas timbal balik. Hal tersebut disusun bersama dalam kalangan terbatas dan tidak dengan kalangan lainnya dalam masyarakat yang sama. Kejujuran dan asas timbal balik tersebut merupakan perwujudan dari modal sosial.

Demokrasi pada dasarnya mengalami varian dalam praktiknya hampir semua orang sepakat bahwa kata kunci demokrasi adalah rakyat. Pengalaman panjang Indonesia menjadi negara demokrasi membuktikan bahwa

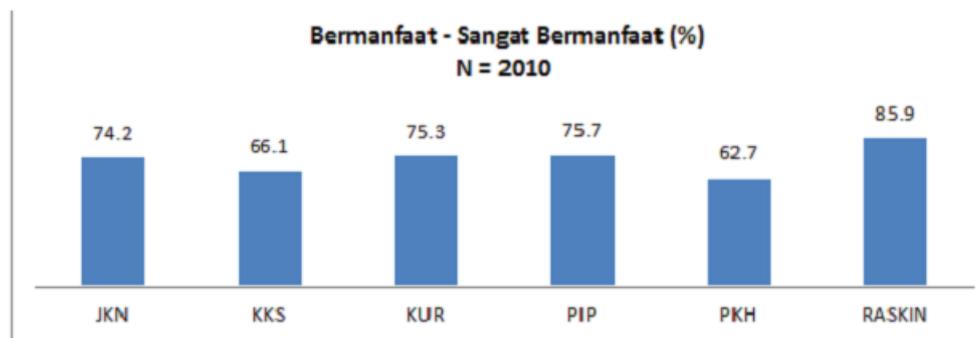
klaim sebagai negara demokrasi sudah menjadi komitmen kolektif di antara elit bangsa ini, nyatanya ketika dipraktikkan menjadi berbeda dari satu rezim ke rezim lainnya. Held (Bagnasco, 2001) menyatakan demokrasi yang dimaknai sebagai pemerintahan oleh rakyat mengandung muatan utama bernama kesetaraan politik. Modal sosial demokrasi yang dinyatakan oleh Held adalah kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Modal lainnya adalah menghubungkan dan menengahi berbagai permasalahan yang saling bertentangan.

Pembahasan

1. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah: Bukti di Indonesia

Pada masa sekarang, di Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sering dikaitkan dengan tingkat korupsi di lembaga pemerintahan dan

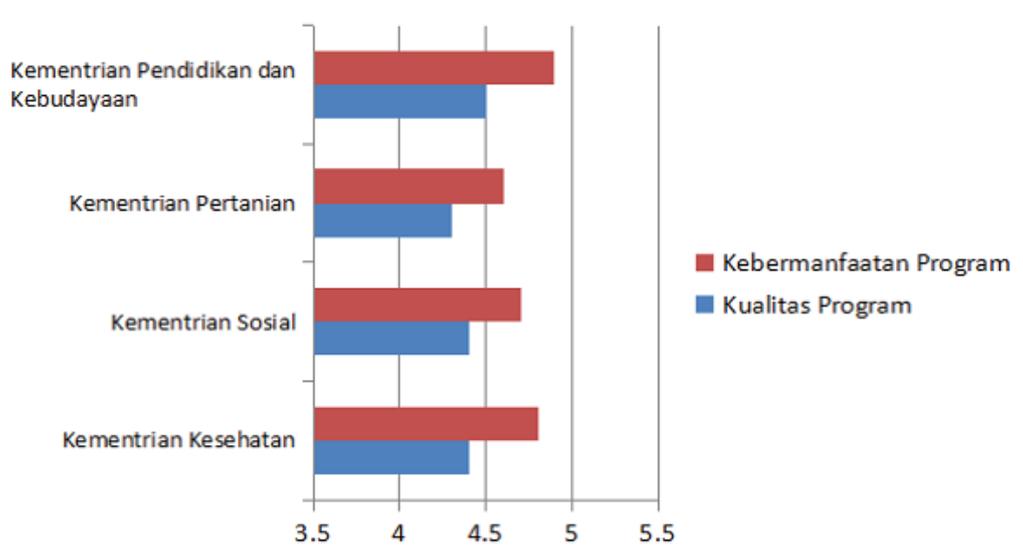
kebermanfaatan program pemerintah bagi mereka. Sebuah survei yang dilakukan oleh Oxfam dapat digunakan sebagai pemahaman awal. Pertanyaan dalam survei tersebut adalah Bagaimana penilaian warga mengenai kinerja program sosial nasional, mencakup Jaminan Kesehatan Nasional (JKN; Kartu Indonesia Sehat; Kementerian Kesehatan), Program Keluarga Harapan (PKH; Kementerian Sosial), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS; Kementerian Sosial), Program Indonesia Pintar (PIP; Kartu Indonesia Pintar; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), Kredit Usaha Rakyat (KUR; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), dan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN; Kementerian Sosial)? Bagaimana pelaksanaan program-program tersebut?



Secara umum program-program sosial yang diselenggarakan di tahun 2015 dinilai bermanfaat oleh warga. Program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah ini dipersepsikan memberikan manfaat

bagi penerimanya dan memang dibutuhkan (Infid, 2016:13).

Untuk menjamin berlangsungnya program tersebut, kinerja kementerian yang berwenang juga harus dilihat.



Rata-rata skor yang didapatkan dari survei ini mengenai kualitas dan kebermanfaatan program jatuh pada titik potong 4 jika dibulatkan. Hal ini secara umum menggambarkan persepsi pada masyarakat bahwa mereka menganggap kualitas serta kebermanfaatan dari program sosial pemerintah berada pada titik agak bermanfaat dan agak baik kualitasnya (Infid, 2016: 14).

Meskipun demikian, kita semua tidak bisa langsung berharap demokrasi akan membaik sekalipun ada dukungan dari rakyat melalui kepercayaan terhadap program-program pemerintah yang sebenarnya merupakan asas timbal balik. Kita juga mengharapkan perbaikan kinerja pemerintah. Perlu diketahui, pembenahan institusional sangat bersifat normatif sehingga cenderung ilusif.

Ketidakpercayaan utama rakyat atau *civil society* pada masa reformasi ini adalah di era reformasi, keadaan

berbalik ke ekstrem baru. Negara seolah-olah lepas tangan. Distribusi kekuatan ekonomi diserahkan ke pasar. Namun, para pelaku ekonomi utama masih belum banyak berubah, yaitu kelompok yang meraup rente di masa Orde Baru. Sebagian mereka menyusup ke partai-partai dan ada juga yang membuat partai baru. Sebagian lagi mencari tumpangan kepada penguasa dan partai berkuasa.

2. Modal Sosial Demokrasi yang Belum Terwujud

Demokrasi sebagaimana dinyatakan David Held memiliki modal sosial berupa kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Ketiga hal tersebut jika terwujud tentunya akan menambah kualitas demokrasi itu sendiri. Kita bahas satu per satu:

a. Kebebasan

Indonesia sendiri dalam Laporan Freedom House dikategorikan sebagai negara yang setengah bebas (*partly free*). Indeks Demokrasi Indonesia pada

tahun 2016 menunjukkan angka 70, 66. Angka ini tidak jauh beda dari hitungan Freedom House sebesar 65. Apakah yang menyebabkan kebebasan di Indonesia belum bebas sama sekali padahal setiap hari kita melihat orang dengan bebas berpendapat, berserikat, dan berkeyakinan sesuai dengan agamanya masing-masing asalkan tidak melanggar hukum?

Penyebab utamanya adalah ukuran kebebasan dari indeks demokrasi itu sendiri, di antaranya kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Untuk mengukur kebebasan sampai kebebasan yang sesungguhnya tentunya masih kurang. Kebebasan yang lumrah di negara Barat belum diakui di Indonesia, misalnya, kebebasan memilih pasangan meskipun sejenis, kebebasan memilih orientasi seksual, kebebasan berpindah keyakinan.

Jika dikaitkan dengan modal sosial, faktor kebebasan ini akan selalu berkaitan dengan norma informal yang meskipun tidak tertulis, tetapi terlembagakan dalam pikiran dan pandangan sebuah masyarakat. Nilai kebebasan yang demikian akan berpengaruh pada terwujudnya

modal sosial karena belum adanya *social tolerance*. Salah satu untuk mengukur pertanyaan *social intolerance* adalah “*On this list are various groups of people. Could you please sort out any that you would not like to have as neighbors?*” (Pippa Norris, 2002: 13). Hal demikian tentunya akan sama bila ditanyakan kepada kita, misalnya, apakah anda setuju punya saudara yang homoseks, apakah saudara setuju punya tetangga yang perkawinannya adalah sejenis, apakah saudara setuju jika anak anda berpindah keyakinan karena akan menikah dengan orang lain.

Hasil penelitian Pippa Norris menunjukkan “*The results confirmed that societies rich in social capital proved generally more tolerant of diverse lifestyles than countries poor in social capital*”. Artinya, jika kondisi ekonomi seorang sudah sedemikian maju. Orang tersebut akan semakin toleran. Hal ini sangat cocok dengan situasi di negara maju. Tentunya kondisi ini lebih banyak berlawanan jika dibandingkan dengan Indonesia yang masih merupakan negara berkembang.

b. Kesetaraan dan keadilan

Indeks kesetaraan di Indonesia sering dinyatakan dalam indeks Gini. Angka indeks Gini di Indonesia sekarang berkisar antara 0, 37 – 0, 39. Dalam dua dekade terakhir, di Indonesia ketimpangan

antara kelompok terkaya dan kelompok yang lain mengalami peningkatan yang lebih cepat dibanding dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 100 juta penduduk termiskin. Ketimpangan tersebut, tidak hanya memperlambat pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial.

Ketimpangan bertentangan dengan esensi dari budaya politik Indonesia, yaitu 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Dengan kata lain, sudah menjadi suatu norma di Indonesia bahwa setiap orang berhak atas akses terhadap kesempatan yang sama. Akhir-akhir ini, perhatian lebih banyak diberikan kepada keterkaitan antara ketimpangan dan konflik. Sebuah studi yang mengkaji hubungan antara ketimpangan ekonomi dan kekerasan, kekerasan etnis dan kejahatan di Indonesia menemukan korelasi positif antara ketimpangan dan jumlah kejadian kekerasan rutin. yang kerap terjadi. Penelitian tersebut juga menemukan ketimpangan yang lebih tinggi antara yang kaya dan yang lainnya berhubungan dengan meningkatnya kejahatan dengan kekerasan. Studi lain menemukan kabupaten dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dari

angka rata-rata di Indonesia memiliki tingkat konflik yang tingginya 1,6 kali dari kabupaten dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah (Oxfam, 2017: 41).

Situasi ini jika dikaitkan dengan modal sosial, kepercayaan dan jaringan. Terbentuknya konflik karena sudah tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan/atau kelompok yang diuntungkan dan jaringan individu dan/atau kelompok yang berdasarkan ketidakpercayaan tersebut. Jaringan ini tumbuh karena ingin menuntut keadilan sosial di bidang ekonomi dan mereka juga ingin diturutsertakan dalam proses pembangunan yang partisipatif.

Ketidakseimbangan kekuasaan yang berakibat pada ketimpangan yang lebar antara kelompok kaya dan kelompok lain semakin melanggengkan ketimpangan karena mereka yang berada di atas memiliki akses istimewa dan pengaruh pada proses pengambilan keputusan yang dimanfaatkan agar perekonomian dan berbagai kebijakan dapat melayani kepentingan mereka, sedangkan kepentingan orang-orang yang berada di bawah cenderung tidak dihiraukan. Hal ini pada gilirannya berakibat pada ketidakstabilan sosial karena ruang politik dan ekonomi digunakan untuk memenuhi kepentingan segelintir

orang daripada kepentingan banyak orang.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan:

1. Berjalannya demokrasi dan modal sosial sudah lama diteliti. Namun, tiga modal sosial utama: kepercayaan, norma informal, dan jaringan haruslah juga beriringan dengan modal sosial demokrasi: kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Meskipun di Indonesia terjadi kepercayaan yang besar rakyat terhadap pemerintah, yang dibuktikan dengan kinerja pemerintah yang bagus dan masyarakat yang percaya kepada program pemerintah akan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri dan kelompok sasaran.
2. Modal sosial demokrasi: kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam memberikan dukungan terhadap tumbuhnya modal sosial di masyarakat masih terhalang akan kebudayaan, hukum, dan masih adanya ketidakadilan di masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Modal sosial adalah aset karena telah menumbuhkan rasa saling percaya dalam bekerja sama sehingga berperan penting mewujudkan model pemerintahan yang baik dan masyarakat madani. Selama ini dalam kehidupan masyarakat berlangsung beragam aktivitas yang didasari modal sosial. Karena itu, perlu ada kepercayaan penuh dari pemerintah

kepada masyarakat agar memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan kesejahteraan dan menggapai status masyarakat madani di mana kekuasaan (otoritas) dan kedaulatan sepenuhnya ada di tangan mereka.

2. Dibutuhkan kepemimpinan yang transforming, dalam artian di Indonesia adalah antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Sikap pemimpin demikianlah yang mendorong terwujudnya modal sosial kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga modal sosial demokrasi dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagnasco, A. 2001. *Trust and Social Capital' pp. 230-239. in Nash, K, and A. Scott, The Blackwell Companion in Political Sociology*, Oxford: Blackwell Publishing.
- Cox, Eva. 1995. *A Truly Civil Society*. Sydney:ABC Book.
- Dasgupta, P., Ismail S. 1999. *Social Capital A Multifaceted Perspective*. Washington DC: World Bank.
- Fukuyama, F. 1992. *The End of History and The Last Man*. New York: Free Press
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, New York: the Free Press
- Infid. 2016. *Indeks Barometer Sosial Indonesia 2016*. Jakarta: Infid
- Miler, Mattew B dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang*

- metode-metode baru.* Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexi J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Onyx, J .1996. *The Measure of Social Capital*”, paper presented to Australian and New Zealand Third Sector Research Conference on Social Cohesion, Justice and Citizenship: The Role of Voluntary Sector, Victoria University, Wellington.
- Oxfam. 2017. *Menuju Indonesia yang Lebih Setara*. Jakarta: Infid, Oxfam, Perkumpulan Prakarsa
- Pippa, N. 2001. *Making Democracy Work: Social Capital and Civic Engagement in 47 Societies* John E. Kennedy School of Government, Harvard University Faculty
- Research Working Papers Series, RWP01-036*
- Putnam, RD. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*, dalam *The American Prospect*, Vol.13, halaman 35-42.
- Putnam, RD. 1995. *Bowling Alone: America’s Declining Social Capital*. dalam *Journal of Democracy*, Vol.6, No.1, halaman 65-78.
- Schmidt, J. 2000. *Is Civility a Virtue* pp. 17-39 in Rouner, S. L. (ed.) *Civility*, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.